



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.031.966.581.000,- bertambah sejumlah Rp.58.687.142.000,- sehingga menjadi Rp.1.090.653.723.000,- dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 911.966.581.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 44.278.342.000,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 956.244.923.000,-

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 1.031.966.581.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 58.687.142.000,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.090.653.723.000,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (134.408.800.000,-)

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 120.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 14.408.800.000,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 134.408.800.000,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	134.408.800.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	222.478.414.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>19.925.882.000,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	242.404.296.000,-

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp.	590.290.453.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>321.051.000,-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	590.611.504.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	99.197.714.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>24.031.409.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	123.229.123.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	32.500.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,-</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	35.000.000.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	5.001.088.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>289.447.000,-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	5.290.535.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	9.982.607.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	9.982.607.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	174.994.719.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>17.136.435.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	192.131.154.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

1) Semula Rp. 24.412.946.000,-

2) Bertambah Rp. 321.051.000,-

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 24.733.997.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 455.177.029.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 455.177.029.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 110.700.478.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 110.700.478.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 16.757.600.000,-

2) Berkurang Rp. (433.600.000,-)

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 16.324.000.000,-

b. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,-

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 40.043.975.000,-

2) Bertambah Rp. 15.230.009.000,-

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 55.273.984.000,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 42.396.139.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 42.396.139.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 9.235.000.000,-

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 9.235.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 333.615.691.000,-

2) Berkurang Rp. (1.038.358.000,-)

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 332.577.333.000,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	698.350.890.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>59.725.500.000,-</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.		758.076.390.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	307.867.090.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>7.053.038.000,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		314.920.128.000,-

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,-

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		0,-

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	16.490.370.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(4.910.000.000,-)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		11.580.370.000,-

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	5.092.290.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(930.000.000,-)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		4.162.290.000,-

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		0,-

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	560.703.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.497.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		563.200.000,-

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	3.605.238.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(2.253.893.000,-)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		1.351.345.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	65.633.709.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(751.525.000,-)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		64.882.184.000,-

b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	387.924.261.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>16.886.126.000,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		404.810.387.000,-
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	244.792.920.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>43.590.899.000,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		288.383.819.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	120.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>14.408.800.000,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		134.408.800.000,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		0,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp.	120.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>14.408.800.000,-</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		134.408.800.000,-
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		0,-

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah penerimaan piutang daerah Rp. 0,-
setelah perubahan

g. Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah penerimaan dana bergulir Rp. 0,-
setelah perubahan

h. Penerimaan hasil penarikan

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah penerimaan hasil penarikan Rp. 0,-
setelah perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan Rp. 0,-
setelah perubahan

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi) Rp. 0,-
pemerintah daerah setelah perubahan

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah pembayaran pokok utang yang Rp. 0,-
jatuh tempo setelah perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan Rp. 0,-
obligasi daerah setelah perubahan

e. Pemberian dana bergulir

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah pemberian dana bergulir setelah Rp. 0,-
Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

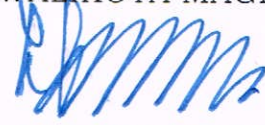
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 13 Agustus 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 13 Agustus 2019

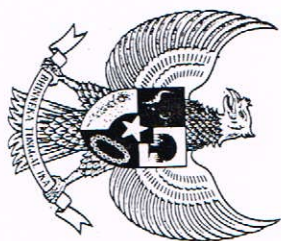
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(2-241/2019)



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

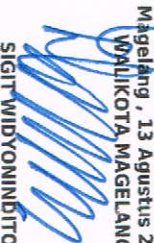
RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

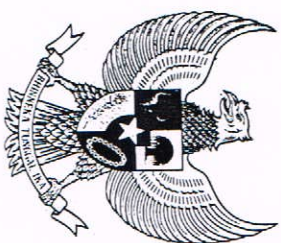
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
		3	4	5	6
1	PENDAPATAN	911.966.581.000,00	956.244.923.000,00	44.278.342.000,00	4,86
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	222.478.414.000,00	242.404.296.000,00	19.925.882.000,00	8,96
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.500.000.000,00	35.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7,69
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.001.088.000,00	5.290.535.000,00	289.447.000,00	5,79
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607.000,00	9.982.607.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.994.719.000,00	192.131.154.000,00	17.136.435.000,00	9,79
1.2	DANA PERIMBANGAN	590.290.453.000,00	590.611.504.000,00	321.051.000,00	0,05
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.412.946.000,00	24.733.997.000,00	321.051.000,00	1,32
1.2.2	Bagi Hasil Pajak Umum	455.177.029.000,00	455.177.029.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	110.700.478.000,00	110.700.478.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.197.714.000,00	123.229.123.000,00	24.031.409.000,00	24,23
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.757.600.000,00	16.324.000.000,00	(433.600.000,00)	(2,59)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975.000,00	55.273.984.000,00	15.230.009.000,00	38,03
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139.000,00	42.396.139.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	100,00
2	BELANJA	1.031.966.581.000,00	1.090.653.723.000,00	58.687.142.000,00	5,69
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	333.615.691.000,00	332.577.333.000,00	(1.038.358.000,00)	(0,31)
2.1.1	Belanja Pegawai	307.867.090.000,00	314.920.128.000,00	7.053.038.000,00	2,29
2.1.4	Belanja Hibah	16.490.370.000,00	11.580.370.000,00	(4.910.000.000,00)	(29,77)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290.000,00	4.162.290.000,00	(930.000.000,00)	(18,26)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00	563.200.000,00	2.497.000,00	0,45
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	1.351.345.000,00	(2.253.893.000,00)	(62,52)
2.2	BELANJA LANGSUNG	698.350.890.000,00	758.076.390.000,00	59.725.500.000,00	8,55
2.2.1	Belanja Pegawai	65.633.709.000,00	64.882.184.000,00	(751.525.000,00)	(1,15)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	387.924.261.000,00	404.810.387.000,00	16.886.126.000,00	4,35
2.2.3	Belanja Modal	244.792.920.000,00	288.383.819.000,00	43.590.899.000,00	17,81
	SURPLUS / (DEFISIT)	(120.000.000.000,00)	(134.408.800.000,00)	(14.408.800.000,00)	12,01
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	14.408.800.000,00	12,01
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	14.408.800.000,00	12,01
	PEMBIAYAAN NETTO	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	14.408.800.000,00	12,01

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Magelang , 13 Agustus 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BIDAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

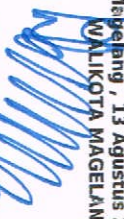
RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019



**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2019**

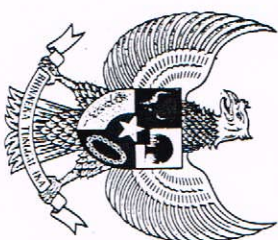
KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG			
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	167.882.378.000,00	183.620.006.000,00	15.737.628.000,00	9,37	184.705.247.000,00	447.143.037.000,00	631.848.284.000,00	191.377.171.000,00	493.802.467.000,00	685.179.638.000,00	53.331.354.000,00	8,44
1.01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	116.820.636.000,00	49.865.546.000,00	166.686.182.000,00	122.447.295.000,00	52.508.023.000,00	174.955.318.000,00	8.269.136.000,00	4,96
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	116.820.636.000,00	49.060.535.000,00	165.881.171.000,00	122.447.295.000,00	51.715.409.000,00	174.162.704.000,00	8.281.533.000,00	4,99
1.01.4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.549.000,00	516.549.000,00	0,00	505.990.000,00	505.990.000,00	(10.559.000,00)	(2,04)
1.01.4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.331.000,00	83.331.000,00	0,00	81.493.000,00	81.493.000,00	(1.838.000,00)	(2,21)
1.01.4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.767.000,00	117.767.000,00	0,00	117.767.000,00	117.767.000,00	0,00	0,00
1.01.4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.364.000,00	87.364.000,00	0,00	87.364.000,00	87.364.000,00	0,00	0,00
1.02	Kesehatan	166.492.578.000,00	182.230.206.000,00	15.737.628.000,00	9,45	50.605.119.000,00	273.250.524.000,00	323.855.643.000,00	51.959.451.000,00	307.440.393.000,00	359.399.844.000,00	35.544.201.000,00	10,98
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	11.492.578.000,00	12.230.206.000,00	737.628.000,00	6,42	25.436.819.000,00	46.430.693.000,00	71.867.512.000,00	25.503.154.000,00	48.992.682.000,00	74.496.036.000,00	2.628.524.000,00	3,66
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	135.000.000.000,00	170.000.000.000,00	15.000.000.000,00	9,68	25.168.300.000,00	225.800.207.000,00	230.968.507.000,00	26.456.297.000,00	257.428.207.000,00	283.884.504.000,00	32.915.967.000,00	13,12
1.02.2.07.01	Dinas Pembudayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.546.000,00	212.546.000,00	0,00	212.546.000,00	212.546.000,00	0,00	0,00
1.02.4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.418.000,00	26.418.000,00	0,00	26.418.000,00	26.418.000,00	0,00	0,00
1.02.4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.818.000,00	277.818.000,00	0,00	277.818.000,00	277.818.000,00	0,00	0,00
1.02.4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.767.000,00	301.767.000,00	0,00	299.667.000,00	299.667.000,00	(1.900.000,00)	(0,63)

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN						BELANJA					
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH /BERKURANG		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		Rp		Rp		Rp	%	Rp		Rp		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.04	Keuangan	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	(14.408.800.000,00)	12,01	0,00	120.000.000.000,00		0,00	120.000.000.000,00		14.408.800.000,00	12,01
4.04.4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	(14.408.800.000,00)	12,01	0,00	120.000.000.000,00		0,00	120.000.000.000,00		14.408.800.000,00	12,01
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SLPA)													
												0,00	0,00

Mepeleang , 13 Agustus 2019
 WALIKOTA MAGELANG

 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. K. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SUB BAG /	
KA SUB BID	



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

RINCIAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

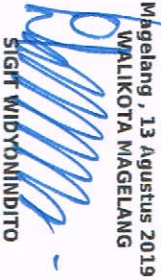
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

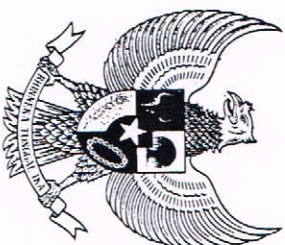
Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan						
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.00.000.5	BELANJA	169.284.703.000,00	177.586.808.000,00	8.302.105.000,00	4,90	
101.10101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	116.820.636.000,00	122.447.295.000,00	5.626.659.000,00	4,82	
101.10101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	116.820.636.000,00	122.447.295.000,00	5.626.659.000,00	4,82	
101.10101.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	52.464.067.000,00	55.139.513.000,00	2.675.446.000,00	5,10	
101.10101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.212.872.000,00	2.258.036.000,00	45.164.000,00	2,04	
101.10101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	223.480.000,00	223.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	223.480.000,00	223.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	827.548.000,00	827.548.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	778.200.000,00	778.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	49.348.000,00	49.348.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	187.946.000,00	201.662.000,00	13.716.000,00	7,30	
101.10101.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	187.946.000,00	201.662.000,00	13.716.000,00	7,30	
101.10101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	50.651.000,00	50.651.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	50.651.000,00	50.651.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.011	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	77.775.000,00	77.775.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	77.775.000,00	77.775.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.321.000,00	10.321.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	10.321.000,00	10.321.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	129.480.000,00	129.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	129.480.000,00	129.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	289.050.000,00	319.850.000,00	30.800.000,00	10,66	
101.10101.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	289.050.000,00	319.850.000,00	30.800.000,00	10,66	
101.10101.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	319.392.000,00	301.016.000,00	(18.376.000,00)	(5,75)	
101.10101.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	319.392.000,00	301.016.000,00	(18.376.000,00)	(5,75)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.19.009	Fasilitasi kepersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	72.920.000,00	87.870.000,00	14.950.000,00	20,50	
407.40701.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.420.000,00	76.370.000,00	14.950.000,00	24,34	
407.40701.19.014	Fasilitasi pusat Inovasi Kota Magelang	71.536.000,00	74.441.000,00	2.905.000,00	4,06	
407.40701.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.186.000,00	58.091.000,00	2.905.000,00	5,26	
407.40701.19.016	Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	41.800.000,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)	
407.40701.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.745.187.000,00)	(4.656.188.000,00)	88.999.000,00	(1,88)	

Magelang , 13 Agustus 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT		PARAF
1. SEKDA		
2. ASISTEN		
3. KABAG		
4. KASUBAG		

PEJABAT		PARAF
1. SEKDA		
2. N.S. BIDAN		
3. SEKRETARIS		
4. KA BID		
5. KA SUB BAG		
6. KA SUB BID		



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

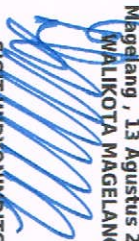
**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

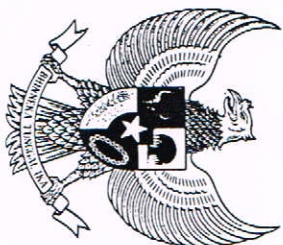
KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/BERKURANG	
		3	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	7	JENIS BELANJA		JUMLAH	Rp	%	
			PEGAJAWI	BARANG DAN JASA				8	MODAL				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	28.544.469.000,00	232.078.266.000,00	186.520.302.000,00	447.143.037.000,00	28.387.625.000,00	247.619.235.000,00	217.795.607.000,00	493.802.467.000,00	46.659.430.000,00	10,44		
1.01	Pendidikan	3.072.007.000,00	41.293.513.000,00	5.500.026.000,00	49.865.546.000,00	2.892.567.000,00	42.797.544.000,00	6.817.912.000,00	52.508.023.000,00	2.642.477.000,00	5,30		
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.010.057.000,00	40.550.452.000,00	5.500.026.000,00	49.060.535.000,00	2.830.617.000,00	42.066.880.000,00	6.817.912.000,00	51.715.409.000,00	2.654.874.000,00	5,41		
1.01.1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.010.057.000,00	40.550.452.000,00	5.500.026.000,00	49.060.535.000,00	2.830.617.000,00	42.066.880.000,00	6.817.912.000,00	51.715.409.000,00	2.654.874.000,00	5,41		
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	780.950.000,00	1.431.922.000,00	0,00	2.212.872.000,00	780.950.000,00	1.477.086.000,00	0,00	2.258.036.000,00	45.164.000,00	2,04		
1.01.1.01.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	223.480.000,00	0,00	223.480.000,00	0,00	223.480.000,00	0,00	223.480.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	778.200.000,00	49.348.000,00	0,00	827.548.000,00	778.200.000,00	49.348.000,00	0,00	827.548.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	187.946.000,00	0,00	187.946.000,00	0,00	201.662.000,00	0,00	201.662.000,00	13.716.000,00	7,30		
1.01.1.01.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	50.651.000,00	0,00	50.651.000,00	0,00	50.651.000,00	0,00	50.651.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	77.775.000,00	0,00	77.775.000,00	0,00	77.775.000,00	0,00	77.775.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.321.000,00	0,00	10.321.000,00	0,00	10.321.000,00	0,00	10.321.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	129.480.000,00	0,00	129.480.000,00	0,00	129.480.000,00	0,00	129.480.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	289.050.000,00	0,00	289.050.000,00	0,00	319.850.000,00	0,00	319.850.000,00	30.800.000,00	10,66		
1.01.1.01.01.01.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honor daerah/tidak tetap	0,00	319.392.000,00	0,00	319.392.000,00	0,00	301.016.000,00	0,00	301.016.000,00	(18.376.000,00)	(5,75)		
1.01.1.01.01.01.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	2.750.000,00	37.241.000,00	0,00	39.991.000,00	2.750.000,00	56.265.000,00	0,00	59.015.000,00	19.024.000,00	47,57		
1.01.1.01.01.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.000.000,00	742.390.000,00	0,00	743.390.000,00	1.000.000,00	594.464.000,00	266.521.000,00	861.985.000,00	118.595.000,00	15,95		
1.01.1.01.01.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500.000,00	166.500.000,00	166.500.000,00	100,00		
1.01.1.01.01.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.021.000,00	100.021.000,00	100.021.000,00	100,00		
1.01.1.01.01.01.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.000.000,00	100.705.000,00	0,00	101.705.000,00	1.000.000,00	57.779.000,00	0,00	58.779.000,00	(42.926.000,00)	(42,21)		

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/BERKURANG	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA		JUMLAH	Rp	%		
			BARANG DAN JASA	MODAL			BARANG DAN JASA	MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.07.4.07.01.01.18	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.18.001	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	121.050.000,00	438.538.000,00	0,00	559.588.000,00	120.150.000,00	459.538.000,00	0,00	579.688.000,00	20.100.000,00	3,59		
4.07.4.07.01.01.19.001	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penetapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	15.000.000,00	59.467.000,00	0,00	70.467.000,00	14.100.000,00	56.912.000,00	0,00	71.012.000,00	545.000,00	0,77		
4.07.4.07.01.01.19.003	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	43.600.000,00	41.245.000,00	0,00	84.845.000,00	43.600.000,00	44.845.000,00	0,00	88.445.000,00	3.600.000,00	4,24		
4.07.4.07.01.01.19.005	Pengembangan dan Penetapan Produk Teknologi dan Inovasi	34.600.000,00	183.420.000,00	0,00	218.020.000,00	34.600.000,00	183.420.000,00	0,00	218.020.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.19.009	Fasilitasi keperguruan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	11.500.000,00	61.420.000,00	0,00	72.920.000,00	11.500.000,00	76.370.000,00	0,00	87.870.000,00	14.950.000,00	20,50		
4.07.4.07.01.01.19.014	Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang	16.350.000,00	59.186.000,00	0,00	71.536.000,00	16.350.000,00	58.091.000,00	0,00	74.441.000,00	2.905.000,00	4,06		
4.07.4.07.01.01.19.016	Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	0,00	41.800.000,00	0,00	41.800.000,00	0,00	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)		

Magelang, 13 Agustus 2019
 WALIKOTA MAGELANG

 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BIDAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BID / KA. SUB BID	



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

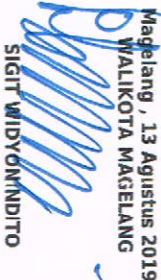
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
REKAPITULASI PERUBAHAN APBD UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
01	Pelayanan Umum	227.914.082.000,00	224.630.666.000,00	(3.283.416.000,00)	(1,44)
01.2.03	Pangan	559.210.000,00	565.520.000,00	6.310.000,00	1,13
01.2.10	Komunikasi dan Informatika	18.874.495.000,00	18.837.403.000,00	(37.092.000,00)	(0,20)
01.2.14	Statistik	614.207.000,00	616.126.000,00	1.919.000,00	0,31
01.2.15	Persandian	142.144.000,00	145.185.000,00	3.041.000,00	2,14
01.2.18	Kearsipan	1.463.404.000,00	1.506.994.000,00	43.590.000,00	2,98
01.4.01	Administrasi Pemerintahan	99.716.343.000,00	103.333.441.000,00	3.617.098.000,00	3,63
01.4.02	Pengawasan	15.324.126.000,00	15.816.106.000,00	491.980.000,00	3,21
01.4.03	Perencanaan	12.378.494.000,00	12.916.880.000,00	538.386.000,00	4,35
01.4.04	Keuangan	52.012.609.000,00	44.001.356.000,00	(8.011.253.000,00)	(15,40)
01.4.05	Kepengawasan	18.651.314.000,00	18.641.493.000,00	(9.821.000,00)	(0,05)
01.4.06	Pendidikan dan Pelatihan	3.444.549.000,00	3.605.974.000,00	161.425.000,00	4,69
01.4.07	Penelitian dan Pengembangan	4.733.187.000,00	4.644.188.000,00	(88.999.000,00)	(1,88)
03	Keterlibatan dan Keamanan	22.403.526.000,00	22.560.094.000,00	156.568.000,00	0,70
03.1.05	Kelentraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	22.403.526.000,00	22.560.094.000,00	156.568.000,00	0,70
04	Ekonomi	79.243.304.000,00	80.302.563.000,00	1.059.259.000,00	1,34
04.2.01	Tenaga Kerja	8.431.203.000,00	8.358.158.000,00	(73.045.000,00)	(0,87)
04.2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.574.680.000,00	7.255.697.000,00	681.017.000,00	10,36
04.2.09	Perhubungan	10.480.599.000,00	10.440.533.000,00	(40.066.000,00)	(0,38)
04.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.225.537.000,00	1.257.096.000,00	31.559.000,00	2,58
04.2.12	Penanaman Modal	5.093.974.000,00	5.165.585.000,00	71.611.000,00	1,41
04.3.01	Kelautan dan Perikanan	654.505.000,00	673.443.000,00	18.938.000,00	2,89
04.3.03	Pertanian	10.207.447.000,00	10.874.241.000,00	666.794.000,00	6,53
04.3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	7.296.778.000,00	7.595.439.000,00	298.661.000,00	4,09
04.3.06	Perdagangan	12.912.032.000,00	12.249.390.000,00	(662.642.000,00)	(5,13)
04.3.07	Perindustrian	16.229.458.000,00	16.297.366.000,00	67.908.000,00	0,42
04.3.08	Transmigrasi	137.091.000,00	135.615.000,00	(1.476.000,00)	(1,08)
05	Lingkungan Hidup	52.105.499.000,00	59.736.110.000,00	7.630.611.000,00	14,64
05.2.04	Pertanahan	7.702.628.000,00	6.879.828.000,00	(822.800.000,00)	(10,68)
05.2.05	Lingkungan Hidup	44.402.871.000,00	52.856.282.000,00	8.453.411.000,00	19,04
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	112.270.574.000,00	121.512.423.000,00	9.241.849.000,00	8,23
06.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96.365.456.000,00	102.667.256.000,00	6.301.800.000,00	6,54
06.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15.905.118.000,00	18.845.167.000,00	2.940.049.000,00	18,48
07	Kesehatan	325.277.811.000,00	360.804.012.000,00	35.526.201.000,00	10,92
07.1.02	Kesehatan	323.855.643.000,00	359.399.844.000,00	35.544.201.000,00	10,98

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		3	4	5 JUMLAH (Rp)	6 %		
1							
07.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.422.168.000,00	1.404.168.000,00	(18.000.000,00)	(1,27)		
08	Partisipasi dan Budaya	8.944.593.000,00	8.873.718.000,00	(70.875.000,00)	(0,79)		
08.2.16	Kebudayaan	3.912.748.000,00	3.928.929.000,00	16.181.000,00	0,41		
08.3.02	Partisipasi	5.031.845.000,00	4.944.789.000,00	(87.056.000,00)	(1,73)		
10	Pendidikan	189.737.277.000,00	198.085.800.000,00	8.348.523.000,00	4,40		
10.1.01	Pendidikan	166.686.182.000,00	174.955.318.000,00	8.269.136.000,00	4,96		
10.2.13	Keperguruan dan Olah Raga	16.559.857.000,00	16.661.224.000,00	101.367.000,00	0,61		
10.2.17	Perpustakaan	6.491.238.000,00	6.469.258.000,00	(21.980.000,00)	(0,34)		
11	Perlindungan Sosial	14.069.915.000,00	14.148.337.000,00	78.422.000,00	0,56		
11.1.06	Sosial	6.632.359.000,00	6.751.959.000,00	119.600.000,00	1,80		
11.2.02	Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.287.463.000,00	1.306.842.000,00	19.379.000,00	1,51		
11.2.06	Administrasi Kependudukan dan Sipil	6.150.093.000,00	6.089.536.000,00	(60.557.000,00)	(0,98)		

Magelang , 13 Agustus 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYANINDITO

PEJABAT		PARAF
1. SEKDA		
2. ASISTEN		
3. KABAG		
4. KASUBAG		

PEJABAT		PARAF
1. SEKDA		
2. W. BIDAN		
3. KEPYEMAS		
4. KA BID		
5. KA SUB BID		



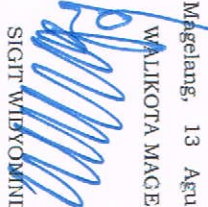
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								0
Golongan IV/d						4		4
Golongan IV/c		23				7		30
Golongan IV/b		3	36			32	1	72
Golongan IV/a		1	59	4		469		533
JUMLAH GOLONGAN IV		27	95	4	0	512	1	
Golongan III/d			11	246		220	29	506
Golongan III/c				83		170	85	338
Golongan III/b				7		213	187	407
Golongan III/a						166	212	378
JUMLAH GOLONGAN III		0	11	336	0	769	513	
Golongan II/d						88	175	263
Golongan II/c						24	145	169
Golongan II/b						23	53	76
Golongan II/a						1	60	61
JUMLAH GOLONGAN II						136	433	
Golongan I/d							35	35
Golongan I/c							46	46
Golongan I/b							2	2
Golongan I/a								0
JUMLAH GOLONGAN I							83	83
TOTAL		27	106	340		1417	1030	2920

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

Magelang, 13 Agustus 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIBISONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KP. BAKAM	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG. / KA. SUB BID	



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM
DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2019**



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

KOTA MAGELANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH											

Magelang, 13 Agustus 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

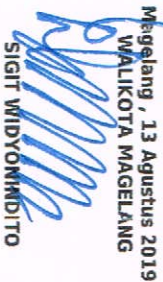
PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

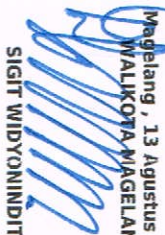
Magelang , 13 Agustus 2019
 WALIKOTA MAGELANG

 SIGIT WIDYONINDITO

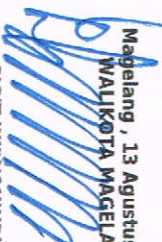
KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN						BELANJA					
		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		Rp	Rp	Rp	Rp	%	TIDAK LANGSUNG Rp	LANGSUNG Rp	JUMLAH BELANJA Rp	TIDAK LANGSUNG Rp	LANGSUNG Rp	JUMLAH BELANJA Rp	BERTAMBAH/ BERKURANG Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.04	Keuangan	120.000.000,00	134.408.800,00	(14.408.800,00)	12,01	0,00	120.000.000,00			0,00	120.000.000,00		14.408.800,00
4.04.4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	120.000.000,00	134.408.800,00	(14.408.800,00)	12,01	0,00	120.000.000,00			0,00	120.000.000,00		14.408.800,00
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)								0,00			0,00	0,00

Magelang , 13 Agustus 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONMUDITO

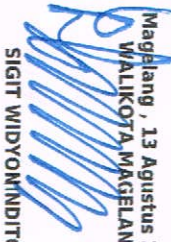
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.19.009	Fasilitasi Kepeersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	72.920.000,00	87.870.000,00	14.950.000,00	20,50	
407.40701.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.420.000,00	76.370.000,00	14.950.000,00	24,34	
407.40701.19.014	Fasilitasi pusat Inovasi Kota Magelang	71.536.000,00	74.441.000,00	2.905.000,00	4,06	
407.40701.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.186.000,00	58.091.000,00	2.905.000,00	5,26	
407.40701.19.016	Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	41.800.000,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)	
407.40701.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.745.187.000,00)	(4.656.188.000,00)	88.999.000,00	(1,88)	

Magelang, 13 Agustus 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/BERKURANG	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA		JUMLAH	Rp	%		
			BARANG DAN JASA	MODAL			BARANG DAN JASA	MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.07.4.07.01.01.18	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.18.001	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	121.050.000,00	438.538.000,00	0,00	559.588.000,00	120.150.000,00	459.538.000,00	0,00	579.688.000,00	20.100.000,00	3,59		
4.07.4.07.01.01.19.001	Forum Koordinasi Jejaring Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	15.000.000,00	55.467.000,00	0,00	70.467.000,00	14.100.000,00	56.912.000,00	0,00	71.012.000,00	545.000,00	0,77		
4.07.4.07.01.01.19.003	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	43.600.000,00	41.245.000,00	0,00	84.845.000,00	43.600.000,00	44.845.000,00	0,00	88.445.000,00	3.600.000,00	4,24		
4.07.4.07.01.01.19.005	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	34.600.000,00	183.420.000,00	0,00	218.020.000,00	34.600.000,00	183.420.000,00	0,00	218.020.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.19.009	Fasilitas kepersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	11.500.000,00	61.420.000,00	0,00	72.920.000,00	11.500.000,00	76.370.000,00	0,00	87.870.000,00	14.950.000,00	20,50		
4.07.4.07.01.01.19.014	Fasilitas pusat inovasi Kota Magelang	16.350.000,00	55.186.000,00	0,00	71.536.000,00	16.350.000,00	58.091.000,00	0,00	74.441.000,00	2.905.000,00	4,06		
4.07.4.07.01.01.19.016	Fasilitas kegiatan Seminar Nasional/Internasional	0,00	41.800.000,00	0,00	41.800.000,00	0,00	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)		

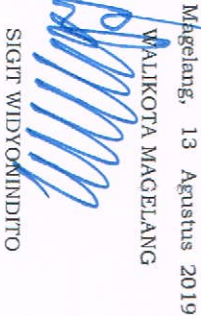
Magelang, 13 Agustus 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
1	2	3	4	JUMLAH (Rp)	%
07.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.422.168.000,00	1.404.168.000,00	(18.000.000,00)	(1,27)
08	Parwisata dan Budaya	8.944.593.000,00	8.873.718.000,00	(70.875.000,00)	(0,79)
08.2.16	Kebudayaan	3.912.748.000,00	3.928.929.000,00	16.181.000,00	0,41
08.3.02	Parwisata	5.031.845.000,00	4.944.789.000,00	(87.056.000,00)	(1,73)
10	Pendidikan	189.737.277.000,00	198.085.800.000,00	8.348.523.000,00	4,40
10.1.01	Pendidikan	166.686.182.000,00	174.955.318.000,00	8.269.136.000,00	4,96
10.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	16.559.857.000,00	16.661.224.000,00	101.367.000,00	0,61
10.2.17	Perpustakaan	6.491.238.000,00	6.469.258.000,00	(21.980.000,00)	(0,34)
11	Perlindungan Sosial	14.069.915.000,00	14.148.337.000,00	78.422.000,00	0,56
11.1.06	Sosial	6.632.359.000,00	6.751.959.000,00	119.600.000,00	1,80
11.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.287.463.000,00	1.306.842.000,00	19.379.000,00	1,51
11.2.06	Administrasi Kependudukan dan Cakil	6.150.093.000,00	6.089.536.000,00	(60.557.000,00)	(0,98)

Magelang , 13 Agustus 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e						4		0
Golongan IV/d						7		4
Golongan IV/c		23				32	1	30
Golongan IV/b		3	36	4		469		72
Golongan IV/a		1	59	4		512	1	533
JUMLAH GOLONGAN IV		27	95	4	0	220	29	506
Golongan III/d			11	246		170	85	338
Golongan III/c				83		213	187	407
Golongan III/b				7		166	212	378
Golongan III/a						769	513	263
JUMLAH GOLONGAN III		0	11	336	0	88	175	169
Golongan II/d						24	53	76
Golongan II/c						1	60	61
Golongan II/b						136	433	35
Golongan II/a							46	46
JUMLAH GOLONGAN II							2	2
Golongan I/d								0
Golongan I/c								
Golongan I/b								
Golongan I/a								
JUMLAH GOLONGAN I		27	106	340		1417	1030	2920
TOTAL								

Magelang, 13 Agustus 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYOININDITO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

KOTA MAGELANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH											

Magelang, 13 Agustus 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINGDITO